

**PENGARUH TEKANAN EKSTERNAL, SUMBER DAYA MANUSIA,  
KOMITMEN MANAJEMEN, DAN KETIDAKPASTIAN LINGKUNGAN  
TERHADAP PENERAPAN TRANSPARANSI PELAPORAN KEUANGAN  
(Studi Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan)**

**Dyah Fajar Setyowati**

**Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

**[Dyahfajar134@gmail.com](mailto:Dyahfajar134@gmail.com)**

**Rizal Yaya**

**Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

**[r.yaya@umy.ac.id](mailto:r.yaya@umy.ac.id)**

**ABSTRACT**

*This research aimed to analyze the Influence of External Pressure, Human Resources, Management Commitment, and Environmental Uncertainty Against Financial Reporting Transparency Implementation. The subjects in this research are the chief of financial officer, the chief of financial sub-section, the staffs compilers of financial statements, and the chief of subdivision which is involved in the financial reporting of The Organization of Regional Equipment in Grobogan regency. The sample in this research amounted to 138 respondents were selected using purposive sampling with the criteria, the government apparatus which is occupying a position such as the chief of the division, the chief of the sub division, and the unit of the government's employee which is directly doing and reporting the estimate. Totaling 148 questionnaires were distributed and 138 questionnaires were returned then can be examined using linear regression models. The analytical tool used is SPSS 15.*

*The statistical analysis shows that the external pressure, human resources, management commitment, and environmental uncertainty has positive influence to the implementation of the transparency of financial reporting. This regression analysis has 91,1% adjusted R<sup>2</sup> indicating high explanation model.*

***Keywords: External Pressure, Human Resources, Management Commitment, Environmental Uncertainty, and Financial Reporting Transparency.***

## PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mendefinisikan otonomi daerah sebagai hak, kewajiban, dan wewenang untuk mengurus dan mengatur sendiri pemerintahan, serta kepentingan masyarakat di daerah-daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Tujuan utama adanya otonomi daerah untuk tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satu upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance*) adalah dengan cara meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara (Putra, 2016). Masyarakat berharap dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah dapat menciptakan efektifitas dan efisiensi dalam upaya pengelolaan sumber daya daerah, meningkatkan kualitas pelayanan umum, kesejahteraan masyarakat, dan memberikan ruang kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan (Mardiasmo, 2006).

Fenomena yang terjadi dalam perkembangan otonomi daerah di Indonesia, menunjukkan adanya respon masyarakat yang sangat tinggi dalam permintaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance*). Hal ini terbukti adanya tuntutan masyarakat mengenai transparansi pelaporan keuangan pemerintah (Purnamasari, 2016). Dalam mekanisme pengelolaan, pelaporan keuangan memiliki dua tujuan yaitu keterlibatan pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan organisasi yang

transparan dalam mekanisme tata kelola pemerintahan (Hess, 2007).

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik. Menindak lanjuti Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah mengeluarkan Instruksi Mendagri No. 188.52/1797/SJ/2012 tentang Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TAPD). Undang-undang menyebutkan bahwa pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi publik secara transparan dan berorientasi kepada masyarakat dalam proses pelayanan untuk mengakses informasi secara cepat, efisien, mudah dipahami dan terjangkau, salah satunya informasi secara berkala mengenai laporan keuangan. Laporan *Corruption Perception Index* (CPI) peringkat Indonesia masih menduduki peringkat yang cukup tinggi, hal ini menunjukkan perlu adanya upaya yang lebih dalam untuk meningkatkan kualitas transparansi pelaporan keuangan (Nosihana dan Yaya, 2016).

## LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Institusional, Pemikiran yang mendasari teori institusional adalah didasari pada pemikiran bahwa untuk bertahan hidup. Organisasi harus meyakinkan kepada publik atau masyarakat bahwa organisasi adalah entitas yang sah (*legitimate*) serta layak untuk didukung. Teori ini juga digunakan

untuk menjelaskan tindakan dan pengambilan keputusan dalam organisasi publik. Teori institusional berpendapat bahwa organisasi yang mengutamakan legitimasi akan memiliki kecenderungan untuk berusaha menyesuaikan diri pada harapan eksternal atau harapan sosial dimana organisasi berada. Penyesuaian pada harapan eksternal atau harapan sosial mengakibatkan timbulnya kecenderungan organisasi untuk memisahkan kegiatan internal dan berfokus pada sistem yang sifatnya simbolis pada pihak eksternal. Organisasi publik yang cenderung untuk memperoleh legitimasi akan cenderung memiliki kesamaan atau isomorfisme dengan organisasi publik lain (Ridha dan Basuki, 2012).

Teori Isomorfisme Institusional, Isomorfisme adalah proses yang mendorong satu unit dalam suatu populasi untuk menyerupai unit yang lain dalam menghadapi kondisi lingkungan yang sama. Penelitian terbaru telah menekankan bagaimana organisasi publik menjadi subjek tekanan institusional yang mendalam sehingga menyebabkan pada umumnya organisasi publik menjadi lebih mirip (Ashworth *et al.*, 2009). Teori institusional organisasi memprediksi bahwa organisasi akan menjadi lebih serupa karena tekanan institusional, baik dikarenakan adanya koersif, normatif, dan mimetik (Ridha dan Basuki, 2012).

Teori *Stewardship*, Teori *stewardship* memandang bahwa manajemen sebagai pihak yang dapat dipercaya oleh publik untuk melakukan tindakan yang baik dan

berguna untuk kepentingan bersama baik secara khusus maupun umum. Implikasi dari teori *stewardship* pada penelitian ini adalah pemerintah. Pemerintah akan bekerja sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyatnya dalam hal transparansi pelaporan keuangan. Pemerintah atau badan publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat dan benar. Seperti memberikan atau menerbitkan informasi mengenai laporan keuangan dan pelaporan keuangan yang mudah dijangkau oleh publik (Puspitarini, 2010).

Teori *Signaling*, mengasumsikan bahwa pemerintah harus berusaha untuk memberikan dan mentransfer signal yang baik kepada masyarakat. Karena pemerintah salah satu pihak yang diberikan amanah dan tanggung jawab oleh masyarakat (Abdullah dan Halim, 2006).

Signal yang harus diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yaitu berupa laporan keuangan pemerintah daerah. Laporan keuangan yang andal, lengkap, detail, berkualitas, dan disajikan dalam *website* pemerintah daerah. Suatu kinerja yang baik dari pemerintah harus di informasikan kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban (Puspita dan Martani, 2012). Dalam pemerintahan terdapat kinerja yang baik yaitu perlu menginformasikan kepada masyarakat, baik dalam bentuk pertanggung jawaban, laporan keuangan, dan bentuk-bentuk bantuan yang digunakan dalam kesejahteraan umum (Abdullah dan Halim, 2006).

Teori *Stakeholder*, merupakan sebuah pihak, baik pihak internal maupun eksternal yang bersifat langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi maupun dipengaruhi dalam suatu hubungan. Pihak internal maupun eksternal *stakeholder* meliputi lembaga swadaya masyarakat, para pekerja, dan lain sebagainya yang keberadaannya sangat mempengaruhi dan dipengaruhi (Dyah, 2012).

Batasan *stakeholder* di atas menunjukkan bahwa pemerintah hendaknya memperhatikan *stakeholder*, karena mereka adalah pihak yang mempengaruhi dan dipengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung atas aktivitas yang dilakukan. Bukan berarti suatu pemerintahan tidak memperhatikan *stakeholder*, akan menuai protes dan legitimasi *stakeholder*. Asumsi dari teori *stakeholder*, bahwa pemerintah tidak dapat melepaskan diri dengan lingkungan sosial sekitarnya (Dyah, 2012).

Transparansi Pelaporan Keuangan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Informasi yang terbuka tentang *input*, *output* dan *outcome*. Transparansi merupakan salah satu sarana untuk menyusun akuntabilitas administratif kepada publik. Salah satu kunci untuk mewujudkan *good government governance* yaitu adanya transparansi. Transparansi yang berupa kebebasan pada setiap orang untuk memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan pemerintah. Seperti pengelolaan

keuangan publik dan penjaminan akses, dengan adanya keterbukaan dalam informasi diharapkan dapat menghasilkan perlawanan politik yang sehat, dan kebijakan-kebijakan pemerintah dibuat dalam preferensi kebutuhan masyarakat (Arfianto, 2016).

Tekanan eksternal, merupakan hasil dari tekanan informal dan tekanan formal. Tekanan-tekanan tersebut dapat mempengaruhi struktur organisasi maupun kegiatan organisasi. Faktor eksternal berupa peraturan organisasi lain seperti pemerintah pusat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan lembaga-lembaga lain. Peraturan-peraturan yang berasal dari luar organisasi juga bisa didapat melalui media massa seperti media cetak, media elektronik, dan media massa internet atau pemberitahuan dari organisasi itu sendiri. Peraturan ditujukan untuk mengatur praktik-praktik agar menjadi lebih baik. Suatu peraturan dapat menyebabkan kecenderungan organisasi untuk memperoleh atau memperbaiki legitimasi (Ridha dan Basuki, 2012).

Sumber daya manusia, adalah suatu potensi yang terdapat pada diri manusia. Potensi tersebut bisa berupa keahlian atau kompetensi yang dimiliki masing-masing individu dan mungkin dari setiap individu tersebut, memiliki perbedaan keahlian/kompetensi atau bahkan sama. Potensi sangat berguna di dalam dunia kerja, karena dalam lingkungan kerja harus memiliki keahlian/kompetensi yang sesuai dengan pekerjaannya, dengan tujuan dapat memberikan kontribusi secara maksimal (Prasetya, 2015).

Komitmen Manajemen, Komitmen dapat diartikan juga sebagai kecenderungan merasa aktif dalam suatu kegiatan yang melekat pada diri individu (Purnamasari, 2016). Manajemen merupakan seseorang yang mempunyai tanggung jawab atas semua kegiatan yang ada pada organisasi dan jalannya organisasi, dalam organisasi manajemen harus melaksanakan pengendalian dan pengorganisasian dengan penuh tanggung jawab. Sehingga dapat mencapai tujuan yang efektif dan efisien (Silvia, 2013).

Perubahan institusional dapat berdampak pada masalah karakter dan integritas organisasi. Strategi integritas merupakan sesuatu yang lebih luas, lebih dalam, dan lebih menuntut daripada inisiatif kepatuhan atas hukum. Suatu peraturan dan kepatuhan akan terwujud bila diikuti oleh komitmen manajemen yang kuat (Ridha dan Basuki, 2012).

Ketidakpastian Lingkungan, ketidakpastian lingkungan dalam hal ini adalah kondisi dimana OPD mengalami ketidakpastian yang dapat disebabkan adanya pengaruh dari luar OPD, seperti sering terjadinya perubahan peraturan, tidak match-nya antara peraturan yang satu dengan yang lain, terjadinya mutasi staf OPD yang cepat, dan lain sebagainya. OPD dituntut untuk menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan yang ada, baik dalam praktik maupun operasionalnya. Praktik yang dimaksud dalam penelitian ini dikhususkan pada penerapan transparansi pelaporan keuangan (Ridha dan Basuki, 2012).

## METODE PENELITIAN

Obyek dalam penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di wilayah Kabupaten Grobogan yaitu aparatur pemerintah yang berperan penting dalam pembuatan anggaran di Organisasi Perangkat Daerah, sehingga dapat memahami dan mengetahui secara langsung mengenai penyusunan pelaporan keuangan. Sampel dalam penelitian ini yaitu kepala bagian keuangan, kepala sub bagian keuangan, staf-staf penyusun laporan keuangan, dan kepala bagian yang terlibat dalam pelaporan keuangan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Grobogan. Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Grobogan terdiri dari 30 Organisasi Perangkat Daerah meliputi Dinas, Badan dan Kantor.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh OPD yang terdapat di Kabupaten Grobogan dengan jumlah sebanyak 30 OPD.

Penelitian ini menggunakan data primer, data tersebut diperoleh secara langsung dari sumbernya tanpa ada media perantara. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk kuesioner, dan di dalam kuesioner tersebut berisikan pernyataan mengenai topik tentang tekanan eksternal, sumber daya manusia, komitmen manajemen dan ketidakpastian lingkungan.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* atau dapat diartikan dengan pengambilan sampel secara disengaja yang telah

ditentukan oleh peneliti dengan diberikan kriteria tertentu, yang merupakan teknik dalam pengambilan sampel dalam penelitian ini. Kriteria responden yang dipakai oleh peneliti dalam pengambilan sampel di OPD Kabupaten Grobogan ini yaitu:

1. Aparatur pemerintah yang menduduki jabatan seperti kepala bagian, kepala sub bagian dan staf-staf bagian keuangan.
2. Satuan kerja dalam pemerintah yang mengetahui secara langsung dalam penyusunan anggaran, turut serta secara langsung dalam penyusunan anggaran dan yang terlibat dalam pelaporan keuangan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

## HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Umum Obyek/Subyek Penelitian

Penelitian ini menggunakan data primer berupa kuesioner yang disebar kepada 148 responden di OPD Kabupaten Grobogan. Jumlah kuesioner yang disebar berjumlah 148 kuisisioner, 3 kuisisioner tidak dapat diolah karena tidak lengkap, dan 7 kuisisioner tidak kembali, sehingga jumlah kuisisioner yang dapat digunakan untuk analisis data pada penelitian ini sebanyak 138 kuisisioner. Kuisisioner dibagikan pada tanggal 26 Oktober 2017 s.d 11 November 2017. Adapun analisis pengembalian kuisisioner disajikan dalam tabel berikut :

**Tabel 4.1**  
**Analisis Pengembalian Kuesioner**

Keterangan	Jumlah	Persentase
Kuesioner yang dikirim	148	100%
Kuesioner yang kembali	141	95%
Kuesioner yang tidak kembali	7	5%
Kuesioner yang kembali dan diolah	138	93%
Kuesioner yang tidak dapat diolah	3	2%

Sumber : Data diolah, 2017

### B. Uji Kualitas Data

#### 1. Uji Validitas

Hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan yang berjumlah 30 item memiliki total koefisien korelasi  $> 0,25$  sehingga dapat

dinyatakan telah memenuhi persyaratan uji validitas yaitu total koefisien korelasi harus  $> 0,25$ . Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa seluruh item pernyataan dapat dikatakan Valid.

## 2. Uji Reliabilitas

Pada tabel Hasil uji reliabilitas pada penelitian ini dapat diketahui bahwa Semua variabel pengujian menunjukkan nilai Cronbach's Alpha

> 0,7 artinya variabel yang digunakan dinyatakan reliabel secara baik atau terdapat kekonsistenan pada suatu pengukuran.

## C. Uji Asumsi Klasik

### 1. Uji Normalitas

Berdasarkan uji *kolmogorov-smirnov* diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,690 sehingga dapat diketahui bahwa masing-masing variabel mempunyai nilai  $\text{sig} > 0,05$ . Variabel-variabel dalam penelitian ini dapat dikatakan mempunyai data berdistribusi normal.

### 2. Uji Multikolinearitas

Data yang ada pada masing-masing variabel independen dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas. Hal ini dapat dilihat dari nilai *Varian Inflation Factor* (VIF) secara keseluruhan < 10 dan nilai *tolerance* > 0,1, maka dapat disimpulkan bahwa data tidak terjadi multikolinearitas.

### 3. Uji Heteroskedastisitas

Dari uji *gletjer* menunjukkan bahwa dalam penelitian ini memperoleh nilai signifikansi secara keseluruhan variabel lebih besar dari 0,05. Data yang terdapat dalam penelitian ini dapat disimpulkan tidak terkena heteroskedastisitas.

## D. Uji Hipotesis

### 1. Analisis Regresi Linear Berganda

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan alat bantu analisis berupa *Statistical Package for the Social Sciences* (SPSS). Analisis regresi berganda yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari antar variabel independen dan dependen yaitu

tekanan eksternal ( $X_1$ ), sumber daya manusia ( $X_2$ ), komitmen manajemen ( $X_3$ ), dan ketidakpastian lingkungan ( $X_4$ ) terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan ( $Y$ ). Hasil dari uji regresi berganda diperoleh persamaan sebagai berikut :

$$Y = 9,197 + 0,314X_1 + 0,490X_2 + 0,329X_3 + 0,325X_4 + e$$

Persamaan regresi di atas menunjukkan bahwa nilai konstanta sebesar 9,197. Jika variabel tekanan eksternal, sumber daya manusia, komitmen manajemen dan ketidakpastian lingkungan dianggap bernilai 0 (nol) atau konstan, maka transparansi pelaporan keuangan akan meningkat sebesar 9,197 satuan.

Koefisien regresi pada variabel tekanan eksternal sebesar 0,314. Hal ini berarti bahwa, jika variabel tekanan eksternal bertambah satu satuan maka, variabel transparansi pelaporan keuangan akan meningkat sebesar 0,314 satuan atau 31,4% dengan catatan variabel yang lain dianggap konstan.

Koefisien regresi pada variabel sumber daya manusia sebesar 0,490. Hal ini berarti bahwa, jika variabel sumber daya manusia bertambah satu satuan maka, variabel transparansi pelaporan keuangan akan meningkat sebesar 0,490 satuan atau 49% dengan catatan variabel yang lain dianggap konstan.

Koefisien regresi pada variabel komitmen manajemen sebesar 0,329. Hal ini berarti bahwa, jika variabel komitmen manajemen bertambah satu satuan maka, variabel transparansi pelaporan keuangan akan meningkat sebesar 0,329 satuan atau 32,9% dengan catatan variabel yang lain dianggap konstan.

Koefisien regresi pada variabel ketidakpastian lingkungan sebesar 0,325. Hal ini berarti bahwa, jika variabel ketidakpastian lingkungan bertambah satu satuan maka, variabel transparansi pelaporan keuangan akan meningkat sebesar 0,325 satuan atau 32,5% dengan catatan variabel yang lain dianggap konstan.

## 2. Uji Statistik Deskriptif

Dapat dideskripsikan bahwa jumlah responden (N) sebanyak 138. Variabel tekanan eksternal memiliki nilai minimum 10,00, nilai maksimum 25,00, *mean* 19,0580, dan standar deviasi 3,02247. Variabel sumber daya manusia memiliki nilai minimum 18,00, nilai maksimum 30,00, *mean* 24,3623, dan standar deviasi 2,72844. Variabel komitmen manajemen memiliki nilai minimum 15,00, nilai maksimum 25,00, *mean* 20,8841, dan standar deviasi 2,28953. Variabel ketidakpastian lingkungan memiliki nilai minimum 15,00, nilai maksimum 25,00, *mean* 19,6522, dan standar deviasi 2,11236. Variabel transparansi pelaporan keuangan memiliki nilai minimum 25,00, nilai maksimum 45,00, *mean* 35,7899, dan standar deviasi 3,94386.

## 3. Uji Signifikansi Secara Simultan (Uji-F)

Berdasarkan hasil Uji F menunjukkan bahwa hasil pengujian memiliki tingkat signifikansi  $0,000 < 0,05$ . Karena tingkat signifikansi  $< 0,05$  maka, dapat dikatakan bahwa tekanan eksternal, sumber daya manusia, komitmen manajemen dan ketidakpastian lingkungan secara bersama-sama atau simultan memiliki pengaruh terhadap transparansi pelaporan keuangan.

## 4. Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R<sup>2</sup>*)

Berdasarkan Uji Koefisien Determinasi menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R<sup>2</sup>* sebesar 0,911. Hal ini berarti 91,1% variasi dari variabel transparansi pelaporan keuangan dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen yaitu tekanan eksternal, sumber daya manusia, komitmen manajemen, dan ketidakpastian lingkungan. Sisanya sebesar 8,9% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak ada dalam penelitian ini.

## 5. Uji Signifikansi Secara Parsial (Uji-t)

Hasil pengujian hipotesis sebagai berikut :

### a. Uji Hipotesis 1 ( $H_1$ )

Hipotesis pertama ( $H_1$ ) menyatakan bahwa variabel tekanan eksternal memiliki nilai signifikansi  $< 0,05$  ( $0,019 < 0,05$ ) dengan nilai koefisien sebesar 0,314. Maka dapat disimpulkan bahwa tekanan eksternal berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis pertama  $H_1$  diterima.

### b. Uji Hipotesis 2 ( $H_2$ )

Hipotesis kedua ( $H_2$ ) menyatakan bahwa variabel sumber daya manusia memiliki nilai signifikansi  $< 0,05$  ( $0,000 < 0,05$ ) dengan nilai koefisien

sebesar 0,490. Maka dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis kedua  $H_2$  diterima.

c. Uji Hipotesis 3 ( $H_3$ )

Hipotesis ketiga ( $H_3$ ) menyatakan bahwa variabel komitmen manajemen memiliki nilai signifikansi  $< 0,05$  ( $0,008 < 0,05$ ) dengan nilai koefisien sebesar 0,329. Maka dapat disimpulkan bahwa komitmen manajemen berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis ketiga  $H_3$  diterima.

d. Uji Hipotesis 4 ( $H_4$ )

Hipotesis ke empat ( $H_4$ ) menyatakan variabel ketidakpastian lingkungan memiliki nilai signifikansi  $< 0,05$  ( $0,038 < 0,05$ ) dengan nilai koefisien sebesar 0,325. Maka dapat disimpulkan bahwa ketidakpastian lingkungan berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis keempat  $H_4$  diterima.

## PENUTUP

Kesimpulan dalam penelitian ini:

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di 30 Organisasi Perangkat Daerah yang berada di Kabupaten Grobogan menyatakan bahwa :
  - a. Tekanan Eksternal berpengaruh positif terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan.
  - b. Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap

Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan.

- c. Komitmen Manajemen berpengaruh positif terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan.
  - d. Ketidakpastian Lingkungan berpengaruh positif terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan.
2. Berdasarkan Uji Regresi Linear Berganda yang diolah dengan program SPSS for Windows, didapat persamaan Regresi Linear Berganda sebagai berikut :

$$\text{TPK} : 9,197 + 0,314 \text{ TE} + 0,490 \text{ SDM} + 0,329 \text{ KM} + 0,325 \text{ KL} + e$$

Hasil kesimpulan di atas, peneliti ingin memberikan saran untuk penelitian selanjutnya yang diantaranya adalah:

1. Metode survei sebaiknya dilengkapi dengan wawancara atau pertanyaan lisan, sehingga pengisian kuesioner menjadi lebih objektif.
2. Membedakan kelompok responden berdasarkan jabatan sebagai pegawai dan spesifikasi jurusan pendidikan terakhir. Hal ini berguna untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih spesifik.
3. Penelitian selanjutnya mungkin dapat mempertimbangkan untuk menggunakan objek penelitian yang lebih luas dengan ruang lingkup Provinsi.
4. Objek penelitian selanjutnya sebaiknya lebih luas cakupan satuan kerjanya karena,

satuan kerja yang lebih luas diharapkan dapat memungkinkan klasifikasi yang berbeda.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman modal.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S., & Halim, A., 2006, Studi atas Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan Belanja Pemeliharaan dan Sumber Pendapatan.
- Al-Amin, M, R., 2015, Faktor Komitmen Aparatur, Kualitas Sumber Daya Manusia, Sistem Informasi, Tingkat Pendidikan, terhadap penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual (Sensus Pada Pemerintah Kota Metro). *Skripsi Strata-1*. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Arfianti, D., & Kawedar, W., 2011, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada satuan kerja perangkat daerah di kabupaten Batang) (*Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro*).
- Arfianto, G, R., 2016, Kajian Yuridis tentang Prinsip Transparansi dalam Kegiatan Investasi di Indonesia berdasarkan
- Ashworth, R., G, Boyne., & R, Delbridge., 2009, Organizational Change and Isomorphic Pressures in the Public Sector. *Journal of Public Administration Research and Theory*.
- Badan Pengawas Keuangan Republik Indonesia, 2015, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, <http://www.bpk.go.id>. Diakses 20 Juli 2017 pk 09.00 WIB.
- Dacin, M., T., Goodstein, J., & Scott, W. R, 2002, Institutional theory and institutional change: Introduction to the special research forum. *Academy of management journal*, 45(1), 45-56.
- Darma, E. S., 2004, Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pengendalian Akuntansi terhadap Kinerja Manajerial dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Pemoderasi pada Pemerintah Daerah (Studi empiris pada Kabupaten dan kota se-Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) (*Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada*).
- Dewi, N. W. S., Edy Sujana, S. E., & Sinarwati, N. K., 2015,

- Pengaruh Tekanan Eksternal, Komitmen Manajemen Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan, (Studi Kasus Pada SKPD Kabupaten Karangasem). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi S1)*, 3(1).
- Dyah, R., 2012, Pengaruh good corporate governance Dan pengungkapan corporate social responsibility Terhadap nilai perusahaan (studi empiris pada perusahaan yang terdaftar Di bursa efek indonesia periode 2007-2010) (*Doctoral dissertation*, Universitas Negeri Yogyakarta).
- Efendy, M., 2010, Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Motivasi terhadap Kualitas Audit Aparat Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan Daerah. Studi Empiris pada Pemerintah Kota Gorontalo. Universitas Diponegoro.
- Evans, J, H., & Patton, J, M., 1987, Signaling and monitoring in public-sector accounting. *Journal of Accounting Research*, hal. 130-158.
- Fardian, D., 2014, Pengaruh Faktor Politik, Ketidakpastian Lingkungan Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan (Studi Empiris atas SKPD Pemerintah Kota Padang). *Jurnal Akuntansi*, 3(1).
- Firdaus, Fidela Firwan., 2015, Evaluasi Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pasien Rawat Jalan Peserta BPJS di RSUD Panembahan Senopati Bantul. Program Studi Manajemen Rumah Sakit Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Hastuti, A, I., 2015, Faktor-faktor yang memengaruhi transparansi pelaporan keuangan daerah di Kabupaten Boyolali. Naskah Publikasi S1 Ekonomi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Hess, D., 2007, Social Reporting and New Governance Regulation : The Prospect of Achieving Corporate Accountability Through Transparency., *Business Ethics Quarterly*, 17(3), 453-476.
- Irmawati, F, D., & Pratolo, S., 2013, Pengaruh Kinerja Keuangan, Politik Dinasti, dan Kinerja Pemerinath Daerah terhadap Akuntabilitas Pelaporan

- Keuangan Pemerintah Tahun.
- Julita., & Belian, E, S., 2015, Pengaruh Ketidakpastian Lingkungan, Komitmen Manajemen dan Tekanan Eksternal Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru.
- Pramita, Y, D., & Khikmah, S, N, 2016, Pengaruh Tekanan Eksternal, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dan Komitmen Manajemen Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan.
- Kumorotomo, W., 2007, Citizen Charter (Kontrak Pelayanan) : Pola Kemitraan Strategis Untuk Mewujudkan Good Governance Dalam Pelayanan Publik., In *Seminar Persadi*, Vol. 16, Juni.
- Liana, L., 2009, Penggunaan MRA dengan Spss untuk Menguji Pengaruh Variabel Moderating terhadap Hubungan antara Variabel Independen dan Variabel Dependen. *Dinamik-Jurnal Teknologi Informasi*, 14(2).
- Mardiasmo, 2006, Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik : Suatu Sarana Good Governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, Vol. 2 No. 1.
- Masruroh, A, F., 2016, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Kota. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 4(7).
- Mayer, A, J., & Ginsberg, H, S., 1977, Persistence of type 5 adenovirus DNA in cells transformed by temperature-sensitive mutant. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, hal. 785-788.
- Medina, F., 2013, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Transparansi Informasi Keuangan pada Situs Resmi Pemerintah Daerah di Indonesia. *Skripsi*. Universitas Indonesia. Depok.
- Mizruchi, M, S., & Fein, L, C., 1999, The Social Construction of Organizational Knowledge A Study of the Uses of Coercive, Mimetic, and Normative Isomorphism. *Administrative Science Quarterly*.
- Narsa, I, M., dkk., 2012, Mengungkap Kesiapan UMKM dalam Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas tanpa Akuntabilitas Publik (PSAK-ETAP)

- untuk Meningkatkan Akses Modal Perbankan. *Majalah Ekonomi*, 22(03), hal. 204-214.
- Nazaruddin, I., & Basuki, A. T., 2015, Analisis statistik dengan SPSS. *Yogyakarta. Penerbit LP3M UMY*.
- Nosihana, A., & Yaya, R., 2016. Internet Financial Reporting dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya Pada Pemerintah Kota dan Kabupaten Di Indonesia. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, 3(2), 89-104.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri, <http://www.kemendagri.go.id>. Diakses tanggal 9 Oktober 2017 pk 10.00 WIB.
- Piotrowski, S. J., & Bartelli, A., 2010, *Measuring Municipal Transparency*. 14th IRSPM Conference, Bern, Switzerland, April.
- Prasetya, K. A., 2015, Pengaruh Tekanan Eksternal, Ketidakpastian Lingkungan, Komitmen Manajemen Dan Sumber Daya Manusia Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan. *Skripsi Strata-1*, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta.
- Pratama, K. A. D., Werastuti, D. N. S., Edy Sujana, S. E., & Msi, A. K., 2015, Pengaruh Kompleksitas Pemerintah Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Kekayaan Daerah, dan Belanja Daerah terhadap Pelaporan Keuangan Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Bali Tahun 2010-2013). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi S1)*, Vol 3(1).
- Purnamasari, R. D. W., 2016, Pengaruh Sumber Daya Manusia, Tekanan Eksternal, Komitmen Manajemen terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol. 4(2).
- Puspita, R., & Martani, D., 2012, Analisis Pengaruh Kinerja dan Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan dan Kualitas Informasi dalam *website* Pemerintah Daerah. *Proceeding SNA*, 15.
- Puspitarini, N. D., 2012, Peran Satuan Pengawasan Intern Dalam Pencapaian Good University Governance Pada Perguruan Tinggi Berstatus PK-BLU. *Accounting Analysis Journal*, Vol. 1(2).

- Putra, B., 2016, Pengaruh Tekanan Eksternal, Pengendalian Internal, Ketidakpastian lingkungan, Komitmen Manajemen, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan. *Skripsi: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Yogyakarta.*
- Rawlins, B, L., 2008, Measuring the Relationship Between Organizational Transparency and Employee Trust. *Public Relations Journal.*
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Ridha, M, A., & Basuki, H., 2012, Pengaruh Tekanan Eksternal, Ketidakpastian Lingkungan, dan Komitmen Manajemen terhadap Transparansi Pelaporan Keuangan. *Makalah Simposium Nasional Akuntansi 15 Banjarmasin.*
- Saputra, M, R., 2015, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Transparansi Pelaporan Keuangan (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Dan Kota Magelang). *Skripsi: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Yogyakarta.*
- Sihaloho, J., 2013, Pengaruh Tekanan Eksternal, Ketidakpastian Lingkungan, dan Komitmen Manajemen terhadap Transparansi Pelaporan Keuangan. Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hillir.
- Silver, D., 2005, Creating Transparency for Public Companies the Convergence of PR and IR in the Post-Sarbanes-Oxley Marketplace. *Public Relations Strategist; Winter 2005, Vol. 11 Issue 1, 14.*
- Silvia, 2013, Pengaruh Keterbatasan Sistem Informasi, Komitmen Manajemen, dan Otoritas Pengambilan Keputusan terhadap Akuntabilitas Kinerja Akuntansi Pemerintah. Studi empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Payakumbuh. *Skripsi, Universitas Negeri Padang, Padang.*
- Transparency Internasional, 2016, Corruption Perceptions Index, <http://www.ti.or.id/index.p>

- hp. Diakses tanggal 17 April 2017 pk 12.57 WIB.
- Transparency Internasional, 2017, Corruption Perceptions Index, <http://www.ti.or.id/index.p>  
hp. Diakses tanggal 17 April 2017 pk 13.00 WIB.
- Transparency Internasional Indonesia, Corruption Perceptions Index, <http://riset.ti.or.id/indonesi>  
a. diakses tanggal 14 Oktober pk 16.00 WIB.
- Ulum, A, S., 2016, Pengaruh Orientasi Etika terhadap Independensi dan Kualitas Audit Auditor BPK-RI. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, Vol. 6(1), hal. 74-93.
- Usut Korupsi Perusahaan Daerah Air Minum, <http://jateng.tribunnews.co>  
m. Diakses tanggal 9 Oktober 2017 pk 15.00 WIB.
- Winidyaningrum, C., 2009, Pengaruh Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan Dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Variabel Intervening Pengendalian Intern Akuntansi (Studi Empiris di Pemda subosukawonosraten) (*Doctoral dissertation*, Universitas Sebelas Maret).
- Zuliarti, 2012, Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi terhadap Nilai Informasi Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah. Studi pada Pemerintah Kabupaten Kudus. *Skripsi*. Universitas Muria Kudus, Kudus.